

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori Dasar

1. Problem Based Learning

a. Definisi *Problem Based Learning*

Problem Based Learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa dalam situasi di mana mereka harus menghadapi permasalahan tertentu yang mendorong aktivitas berpikir kritis atau kerja sama dalam kelompok untuk menemukan solusi. Pada proses ini, terjadi interaksi antara rangsangan yang diberikan dan respon yang muncul dari peserta didik (Widiasworo, 2018). Model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) berakar pada berbagai permasalahan yang memerlukan proses penyelidikan secara autentik, yakni proses pencarian solusi terhadap persoalan-persoalan nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari (Trianto, 2009). Model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) berperan dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengumpulkan informasi, serta membimbing mereka untuk menemukan solusi yang logis dan dapat diterima secara rasional (Riyanto, 2009).

b. Tujuan Pembelajaran *Problem Based Learning*

Problem Based Learning (PBL) bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan dalam menghadapi berbagai situasi nyata dalam kehidupan, serta mengajarkan mereka bagaimana menjalankan peran sebagaimana orang dewasa dalam proses pemecahan masalah.

Dalam pendekatan *Problem Based Learning* (PBL), siswa memanfaatkan pemicu berupa studi kasus atau skenario permasalahan untuk merumuskan tujuan pembelajaran secara mandiri. Mereka kemudian melaksanakan proses belajar secara independen dan terarah sebelum kembali berdiskusi dalam kelompok guna mengklarifikasi serta memperdalam pemahaman yang telah diperoleh. Dengan demikian, fokus utama PBL adalah pada proses penyelesaian masalah yang relevan, bukan semata-mata pada permasalahan itu sendiri. Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara sistematis dan dapat diterapkan dalam konteks kehidupan nyata (Wood, 2003).

Kelompok belajar tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter melalui pengembangan sikap seperti komunikasi yang baik, kemampuan bekerja dalam tim, saling menghargai, tanggung jawab terhadap

proses belajar, serta kemampuan berbagi informasi. Oleh karena itu, *Problem Based Learning* (PBL) merupakan bentuk kelompok belajar kecil yang mengintegrasikan penguasaan pengetahuan dengan pengembangan sikap dan keterampilan umum(Wood, 2003). *Problem Based Learning* (PBL) dapat dijadikan sebagai pendekatan utama dalam menyusun keseluruhan kurikulum. Modul atau program pembelajaran jangka pendek dapat dirancang dengan memadukan berbagai metode pengajaran, termasuk PBL, guna mencapai capaian pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam pelaksanaan PBL, penting bagi siswa untuk memiliki waktu yang memadai setiap minggunya agar dapat menjalani proses pembelajaran mandiri yang menjadi bagian penting dari metode ini(Wood, 2003). Salah satu model pembelajaran yang berakar pada paradigma konstruktivisme dan menempatkan peserta didik sebagai pusat aktivitas belajar dengan penekanan pada proses pembelajaran adalah model *Problem Based Learning* (PBL)(Kurniawan and Wuryandani, 2017). *Problem Based Learning* (PBL) memfasilitasi siswa dalam memahami konsep dan materi pelajaran melalui penyajian permasalahan nyata yang merangsang proses berpikir mereka(Saputra, 2021).

c. Karakteristik Pembelajaran *Problem Based Learning*

Pemecahan masalah memiliki tiga karakteristik utama: pertama, merupakan aktivitas kognitif yang turut memengaruhi perilaku individu; kedua, hasil akhir ditentukan oleh langkah-langkah atau tindakan yang diambil selama proses pemecahan masalah; dan ketiga, proses ini melibatkan manipulasi atau pengolahan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya (Wena, 2009).

Karakteristik dari model pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang disajikan bersumber dari situasi nyata, sehingga peserta didik dapat merumuskan pertanyaan serta mengeksplorasi berbagai alternatif solusi untuk menyelesaikannya.
- b. Masalah yang muncul bersifat multidisipliner, memungkinkan siswa menganalisis dan menyelesaikannya melalui berbagai perspektif keilmuan.
- c. Proses pembelajaran melibatkan diskusi aktif antar siswa dan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah.
- d. Hasil akhir dari pembelajaran ini berupa produk yang konkret dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Widiasworo, 2018).

2. Kurikulum Merdeka

a. Definisi Kurikulum Merdeka

Pemerintah terus berupaya menemukan solusi agar akses pendidikan semakin merata pasca pandemi Covid-19. Salah satu langkah strategis jangka panjang yang diambil adalah penerapan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi lulusan, baik dalam aspek *soft skill* maupun *hard skill*, agar mereka lebih siap menghadapi tantangan zaman. Selain itu, kurikulum ini juga dirancang untuk membentuk lulusan yang tangguh dan berkarakter, serta mampu menjadi pemimpin masa depan bangsa (Yunita et al., 2023).

b. Tujuan Kurikulum Merdeka

Pada tahun 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengganti Kurikulum 2013 dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini terdiri dari dua gagasan utama, yaitu "Merdeka Belajar" dan "Kampus Merdeka". Konsep Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam berpikir secara mandiri serta mengembangkan ide-ide baru (Ainia, 2020). Sementara itu, konsep Kampus Merdeka merupakan bentuk pendidikan tinggi yang lebih progresif, yang di dalamnya mencakup program

pembelajaran secara mandiri. Penerapan kebijakan belajar mandiri ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mentransformasi sistem pendidikan, guna membentuk sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan mencerminkan Profil Pelajar Pancasila (Kemendikbudristek, 2021). Mengacu pada World Economic Forum (2016), peserta didik diharapkan menguasai keterampilan abad ke-21. Terdapat tiga kelompok utama dari enam belas keterampilan tersebut, yakni literasi, kompetensi, dan karakter. Di samping itu, siswa juga perlu dibekali kemampuan untuk menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, dunia kerja, dunia usaha, serta perkembangan teknologi. Oleh karena itu, setiap institusi pendidikan dituntut untuk mengadopsi literasi baru dan memiliki arah pendidikan yang jelas (Lase, 2019). Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pengembangan dan penerapan proses pembelajaran yang inovatif. Dengan cara ini, siswa dapat mengoptimalkan seluruh aspek kurikulum MBKM, baik dari sisi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dalam Kurikulum Merdeka, kesiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang inovatif. Pendekatan

ini memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengembangkan secara optimal aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang tercakup dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).(Kemendikbudristek, 2021).

Merdeka Belajar merupakan konsep yang memberikan keleluasaan bagi guru dan peserta didik dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selama ini, sistem pendidikan di Indonesia cenderung berfokus pada aspek pengetahuan semata, sehingga melalui Merdeka Belajar, proses pendidikan diharapkan menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya pembentukan karakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Upaya perbaikan dalam sistem dan metode pendidikan menjadi langkah penting dalam menanamkan nilai-nilai pembangunan karakter. Diharapkan, penerapan Merdeka Belajar tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar(Ainia, 2020). Kebijakan Merdeka Belajar memperkuat peran guru dalam merancang kurikulum serta menjalankan proses pembelajaran. Dalam konsep ini, guru berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing jalannya

pembelajaran, dengan dukungan dari empat kompetensi utama, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Melalui penguasaan kompetensi tersebut, guru memiliki kemampuan untuk merealisasikan implementasi serta tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar secara efektif (Pendi, 2020).

Pemerintah menetapkan empat kebijakan utama dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, yaitu: Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan penghapusan Ujian Nasional (UN) (Kemdikbud, 2019), diantaranya:

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dilaksanakan oleh masing-masing sekolah sebagai sarana untuk mengukur kompetensi siswa. Ujian ini dapat dilakukan secara tertulis dan diperkuat dengan metode penilaian lainnya, seperti portofolio dan penugasan.
2. Ujian Nasional dihapus dan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. AKM menekankan pada kemampuan literasi dan numerasi siswa dalam konteks kehidupan sehari-hari, sementara Survei Karakter

berfokus pada pemahaman nilai-nilai dan penerapan sikap yang mencerminkan karakter siswa.

3. Rencana Pembelajaran Merdeka dirancang secara lebih sederhana, terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Guru juga diberikan kebebasan untuk menambahkan komponen lain sesuai kebutuhan. Penyederhanaan ini diatur melalui Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019.
4. Sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru (PPDB) menjadi lebih fleksibel. Komposisinya meliputi 50% jalur zonasi, 15% afirmasi, 5% perpindahan tugas orang tua, dan 5% jalur prestasi. Penetapan zonasi disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing daerah, yang memiliki wewenang penuh dalam menentukan pembagian zonasi tersebut (Kemendikbud, 2019).

Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengurangi beban belajar siswa, termasuk jumlah jam pelajaran, khususnya dalam pembelajaran tatap muka. Materi yang diajarkan juga disederhanakan. Fokus utama kurikulum ini adalah pada pengembangan kreativitas, pembentukan karakter, serta peningkatan kemampuan peserta didik. Secara garis besar, Kurikulum Merdeka terdiri dari tujuh komponen utama, yaitu: struktur kurikulum, capaian

pembelajaran (CP), mekanisme pembelajaran, alokasi waktu, pendekatan pembelajaran kolaboratif, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS), serta integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)(Mulyasa, 2023).

c. Dampak Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendalanya adalah kesiapan pendidik dalam mengubah peran mereka. Guru yang sebelumnya mengajar dengan pendekatan seragam untuk seluruh siswa, kini dituntut untuk mendorong peserta didiknya menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Meskipun secara substansi Kurikulum Merdeka tidak jauh berbeda dari Kurikulum 2013, guru diharapkan mampu berperan sebagai pembimbing, fasilitator, maupun pelatih dalam kegiatan pembelajaran aktif yang berpusat pada proyek. Penggunaan istilah baru dalam Kurikulum Merdeka pada dasarnya merupakan pengemasan ulang dari konsep-konsep yang telah ada sebelumnya. Kendala muncul ketika guru harus menyusun tujuan pembelajaran secara mandiri. Walaupun diberikan kebebasan, masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk merancang rencana pembelajaran yang efektif(Anggraini et al., 2022).

Dalam merancang pembelajaran Kurikulum Merdeka, guru memiliki sejumlah tanggung jawab penting, antara lain: (1) merumuskan tujuan pembelajaran yang khas dan relevan dengan arah kurikulum, karakteristik mata pelajaran, kondisi peserta didik, serta situasi kelas; (2) menciptakan proses pembelajaran yang efektif guna membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan; (3) melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai bentuk penerapan kurikulum; dan (4) melakukan evaluasi terhadap jalannya proses pembelajaran. Hal ini menegaskan bahwa peran guru sangat krusial dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, sebab inti dari kebijakan ini terletak pada kemandirian guru dan siswa dalam menjalani proses belajar mengajar (Anggraini et al., 2022). Karena konsep Merdeka Belajar lahir dari dampak revolusi industri 4.0, guru dituntut untuk merancang strategi atau pendekatan pembelajaran yang mendukung kemandirian belajar siswa, khususnya dalam penguasaan keterampilan abad ke-21 seperti literasi manusia, literasi data, dan literasi teknologi. Peran guru pun disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum, yaitu sebagai pendidik, pembimbing, dan pengajar. Sebagai pendidik, guru berperan dalam membantu proses pertumbuhan dan kedewasaan siswa melalui aktivitas

pembelajaran; sebagai pembimbing, guru mendampingi siswa dalam memahami diri serta menyelesaikan persoalan yang dihadapi; dan sebagai pengajar, guru menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermakna, efektif, dan menyenangkan(Daga, 2021).

Dalam Kurikulum Merdeka, penggunaan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lagi menjadi acuan utama dalam penilaian. Penilaian dilakukan secara menyeluruh untuk memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Guru diberikan keleluasaan untuk melakukan penilaian secara mandiri sesuai dengan konteks pembelajaran masing-masing. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, pada 11 Desember 2019 di Jakarta. Empat pilar utama kebijakan ini meliputi: penghapusan Ujian Nasional (UN) yang digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter; penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); serta penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang mengedepankan sistem zonasi. Pelaksanaan penilaian dalam semangat Merdeka Belajar di sekolah penggerak menunjukkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah mengurangi tekanan terhadap siswa dan guru karena tidak ada lagi keharusan mencapai nilai

minimum tertentu. Namun, sisi negatifnya adalah menurunnya semangat kompetitif siswa karena tidak ada standar nilai yang harus dicapai (Putri and Handayani, 2021).

3. Guru

a. Definisi Guru

Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki peran utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Pada poin kesembilan dalam Kode Etik Guru Indonesia ditegaskan bahwa "guru menjalankan seluruh kebijakan pemerintah di bidang pendidikan". Di Indonesia, tanggung jawab atas kebijakan pendidikan berada di tangan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan sektor pendidikan nasional (Hamid, 2017).

Sikap profesional seorang guru mencakup pandangan dan perilaku terhadap berbagai aspek, seperti peraturan perundang-undangan, organisasi profesi, rekan sejawat, peserta didik, lingkungan kerja, atasan, serta tanggung jawab terhadap tugasnya. Dalam Kode Etik Guru Indonesia dinyatakan dengan tegas bahwa "guru

mengabdikan diri untuk membimbing peserta didik dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila". Pernyataan tersebut memuat sejumlah prinsip penting yang harus menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan perannya sehari-hari, yaitu berorientasi pada tujuan pendidikan nasional, menjunjung tinggi prinsip membimbing, serta berkomitmen terhadap pembentukan pribadi manusia Indonesia yang utuh(Hamid, 2017).

Guru sebagai pendidik memiliki peran kunci dalam menentukan keberhasilan suatu proses pendidikan. Oleh karena itu, setiap diskusi mengenai reformasi kurikulum, penyediaan sarana pembelajaran, hingga pembahasan tentang kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari proses pendidikan, pada akhirnya akan kembali pada peran guru. Ini menunjukkan betapa pentingnya posisi guru dalam sistem pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pasal 39 Ayat 2, dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, membimbing dan melatih peserta didik, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, guru merupakan sosok profesional yang memiliki

pengetahuan dan keahlian, serta mentransfer ilmunya kepada orang lain, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia(Hazmi, 2019).

b. Peran dan Tugas Guru

Secara khusus, guru memiliki beberapa peran utama, yaitu: (1) sebagai pengajar (instruksional), yang bertugas merancang dan melaksanakan program pembelajaran serta melakukan evaluasi setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan; (2) sebagai pendidik (edukator), yang membimbing peserta didik menuju kedewasaan dan pembentukan kepribadian yang utuh; dan (3) sebagai pemimpin (manajerial), yang bertugas mengarahkan, mengelola, mengawasi, serta mengorganisasi diri sendiri, peserta didik, dan lingkungan sekitar yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Peran kepemimpinan ini mencakup tanggung jawab dalam pelaksanaan program pendidikan secara menyeluruh. Tugas guru tidak hanya terbatas pada menciptakan suasana belajar yang kondusif, tetapi juga mencerminkan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam membimbing peserta didik agar tumbuh menjadi individu yang cerdas serta memiliki akhlak yang mulia(Hazmi, 2019).

Tugas Guru Dalam Proses Pembelajaran:

Merencanakan

2) Tujuan Pembelajaran

Dalam suatu proses pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar peserta didik memahami apa yang harus dicapai setelah kegiatan belajar selesai dilaksanakan.

3) Bahan Ajar

Bahan ajar menjadi komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat alat atau media yang berisi materi, metode, serta batasan-batasan tertentu yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guna mendukung tercapainya tujuan belajar secara optimal, guru perlu menyediakan materi yang relevan dan membantu siswa memahami pelajaran dengan lebih baik.

4) Proses Pembelajaran yang Diciptakan

Salah satu aspek penting yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang kondusif akan memberikan peluang lebih besar bagi peserta didik untuk memahami materi dengan baik.

5) Alat Ukur Pencapaian Tujuan Pembelajaran

Pencapaian tujuan pembelajaran dapat diketahui melalui evaluasi yang dilakukan oleh guru. Evaluasi ini dapat berupa ulangan harian, tugas, atau bentuk penilaian lainnya. Salah satu alat ukur yang umum digunakan adalah tes, yaitu seperangkat pertanyaan atau latihan yang dirancang untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, atau potensi peserta didik (Hazmi, 2019).

Melaksanakan

Situasi atau kondisi dalam pembelajaran merupakan keadaan di mana terjadi aktivitas belajar yang melibatkan proses pemahaman dan pengalaman melalui berbagai tahapan pemikiran. Kondisi belajar ini merupakan suatu keadaan yang dirancang untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada peserta didik, setelah mereka berada dalam situasi tersebut dan mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung (Hazmi, 2019).

Evaluasi

Evaluasi program merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menilai sejauh mana tujuan dari program pembelajaran telah tercapai. Informasi yang diperoleh dari proses evaluasi ini kemudian dimanfaatkan sebagai acuan untuk

menentukan langkah tindak lanjut, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan program selanjutnya(Hazmi, 2019).

Butir keenam dalam Kode Etik Guru Indonesia menyatakan bahwa "*guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya*". Pernyataan ini mengandung makna bahwa setiap guru, baik secara individu maupun dalam kelompok, memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas dan kehormatan profesinya. Seperti halnya profesi lain, seorang guru tidak akan mampu meningkatkan kualitas dan martabat profesinya apabila tidak berupaya memperluas pengetahuan dan keterampilannya. Hal ini penting, mengingat ilmu dan teknologi yang menjadi landasan profesi keguruan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman(Hamid, 2017).

Sebagai profesi yang dituntut mampu merespons perubahan dan dinamika dalam masyarakat, peran guru perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam menjalankan tugasnya, guru dituntut untuk senantiasa melakukan pembaruan sikap dan pendekatan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Upaya untuk meningkatkan profesionalisme ini dapat dilakukan baik selama masa

pendidikan prajabatan maupun saat guru telah menjalankan tugasnya di lapangan (dalam jabatan)(Hamid, 2017).

4. Pembelajaran IPS

a. Definisi Pembelajaran IPS

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, khususnya permasalahan terkait keberagaman. Isu-isu seperti perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang kerap menjadi sumber konflik di Indonesia, idealnya dapat diminimalisir melalui pembelajaran IPS yang menanamkan nilai toleransi, persatuan, dan saling menghargai antarwarga(Hilmi, 2017). Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pertama, IPS membantu peserta didik dalam memahami kehidupan sosial dan kondisi alam di sekitarnya, baik sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, maupun warga negara yang mandiri, serta dalam konteks keagamaan dan lingkungan. Kedua, IPS menumbuhkan kesadaran, rasa percaya diri, dan pemahaman tentang arti penting hidup bersama yang dilandasi nilai tanggung jawab, solidaritas, dan kemanusiaan. Ketiga, mata pelajaran ini juga membekali siswa dengan kemampuan

untuk menjalin hubungan sosial serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Keempat, IPS memastikan peserta didik memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk berkembang sebagai pribadi, warga masyarakat, dan bagian dari umat manusia. Kelima, IPS mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Nasution and Lubis, 2018).

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bentuk adaptasi dari istilah *Social Studies*. Istilah ini merujuk pada kumpulan ilmu-ilmu sosial yang telah disederhanakan untuk keperluan pendidikan. Cakupannya meliputi berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, psikologi, geografi, dan filsafat. Dalam pelaksanaannya, unsur-unsur dari bidang ilmu tersebut dipilih dan disesuaikan untuk dijadikan materi pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Jika ditelaah lebih dalam, konsep *social studies* mengandung sejumlah elemen penting yang menjadi landasan dalam pengembangannya sebagai mata Pelajaran. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki akar dari berbagai disiplin ilmu sosial. Keberadaannya dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan, khususnya dalam konteks institusi pendidikan formal. Dalam implementasinya, komponen-komponen yang membentuk IPS perlu dipilih

secara selektif dan relevan dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan saat ini. Materi yang disusun juga harus mampu mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat, baik yang terjadi di masa lalu, masa kini, maupun yang diproyeksikan di masa mendatang (Nasution and Lubis, 2018).

Ilmu-ilmu sosial merupakan fondasi utama dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Namun, tidak semua cabang dari ilmu sosial dapat langsung dijadikan materi pembelajaran dalam IPS. Pemilihan materi harus mempertimbangkan usia siswa, jenjang pendidikan, serta tingkat perkembangan pengetahuan mereka. Hal ini penting agar materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Perlu dipahami bahwa ilmu sosial dan IPS memiliki perbedaan mendasar. Pertama, ilmu sosial mencakup kajian terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Misalnya, sosiologi mempelajari interaksi sosial, antropologi fokus pada kebudayaan, ekonomi meneliti kebutuhan manusia, geografi membahas hubungan manusia dan ruang, politik menyoroti kekuasaan, sejarah mengulas peristiwa masa lalu, dan psikologi sosial mengkaji proses mental manusia sebagai makhluk sosial. IPS tidak berdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri seperti cabang-cabang ilmu sosial tersebut, melainkan merupakan gabungan dari berbagai aspek kehidupan sosial yang disusun secara terpadu untuk tujuan

pendidikan. Kedua, ilmu sosial lebih menitikberatkan pada kajian ilmiah murni, dengan tujuan merumuskan teori dan prinsip yang didasarkan pada penelitian akademik. Setiap cabang ilmu sosial bertujuan menjelaskan fenomena sosial secara ilmiah. Sementara itu, IPS atau studi sosial difokuskan pada dunia pendidikan. Oleh karena itu, IPS sering disebut sebagai bentuk pendidikan dari ilmu sosial, di mana materi-materi dari ilmu sosial digunakan dan disesuaikan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah (Nasution and Lubis, 2018).

b. Tujuan dan Ruang Lingkup Pembelajaran IPS

Mempelajari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sangatlah penting bagi siswa karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu berada dalam lingkungan masyarakat. Untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif, setiap individu perlu memahami berbagai konsep serta prinsip sosial. Dengan pengetahuan tersebut, diharapkan siswa mampu membentuk sikap yang tepat dan terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial, baik dalam lingkup masyarakat, bangsa, maupun negara (Nasution and Lubis, 2018). Tujuan utama dari pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah untuk membentuk peserta didik yang

memiliki kepekaan terhadap persoalan-persoalan sosial di sekitarnya, memiliki sikap mental yang positif terhadap upaya perbaikan ketimpangan sosial, serta memiliki keterampilan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang dialami secara pribadi maupun yang terjadi di lingkungan masyarakat. Secara lebih rinci, tujuan tersebut meliputi:

- a) Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar melalui pemahaman nilai-nilai budaya serta sejarah sosial.
- b) Memahami konsep-konsep dasar dalam ilmu sosial dan mampu menerapkannya untuk menyelesaikan persoalan sosial secara kontekstual.
- c) Mampu menerapkan pola pikir ilmiah dan mengambil keputusan yang tepat dalam merespons berbagai isu yang muncul di masyarakat.
- d) Memiliki kemampuan dalam menentukan solusi atas permasalahan sosial yang sedang berkembang di lingkungan sekitar (Rando and Wali, 2018).

Jika dibandingkan dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia, disiplin ilmu sosial di Amerika Serikat jauh lebih beragam. Di sana, cabang-cabang seperti antropologi mencakup berbagai bidang lain seperti arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi,

ilmu politik, hukum, serta pendidikan kewarganegaraan(Nasution and Lubis, 2018).

Ruang lingkup materi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mencakup beberapa hal penting, yaitu; a) Merupakan hasil integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial dan humaniora; b) Berkaitan erat dengan isu-isu sosial, kemasyarakatan, serta kebangsaan yang berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika global; c) Isi materi IPS meliputi fakta, konsep, serta generalisasi, dan mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotorik, serta spiritual. Dalam pembelajaran IPS pada jenjang yang lebih tinggi, siswa diharapkan dapat memahami ilmu pengetahuan serta menjalin hubungan sosial yang harmonis. Untuk siswa di jenjang yang lebih rendah, pendekatan pembelajaran hendaknya mempertimbangkan unsur bermain dan penanaman nilai secara menyenangkan. Mereka harus dilibatkan dalam aktivitas yang membentuk sikap tanggung jawab, keteraturan, dan kerja sama dalam kelompok. Metode pembelajaran seperti diskusi, tugas individu dan kelompok, serta tanya jawab sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai dan sudut pandang dalam IPS. Pendekatan hafalan atau drilling tidak disarankan karena hanya menyampaikan nilai sebagai pengetahuan tanpa menyentuh hati dan logika siswa. Penanaman nilai yang baik harus bisa diterima secara

rasional oleh siswa, agar nilai tersebut menjadi bagian dari keyakinan pribadi mereka. Dengan demikian, siswa dapat memaknai dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap tema atau topik IPS sebagai pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari (Rando and Wali, 2018).

Salah satu upaya dalam memperkuat ketahanan suatu negara adalah melalui pendidikan yang menanamkan pemahaman tentang keberagaman. Keberagaman justru menjadi kekuatan utama suatu bangsa untuk mampu bersaing dengan negara lain di kancah global. Melihat kondisi tersebut, pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) menjadi salah satu solusi efektif dalam menangani persoalan tersebut. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan penerapan konsep-konsep IPS sangat dipengaruhi oleh pengalaman, kedewasaan, serta kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal (Hilmi, 2017).

B. Penelitian Yang Relevan

Tabel: 1.1

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

1.	Sri Hartatik (2022). “Jurnal”.	“Penerapan <i>Problem Based Learning</i> dalam Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar peserta Didik sesuai Kurikulum Merdeka”	Berdasarkan hasil observasi prasiklus pada peserta didik kelas X jurusan Pemasaran (PMS) pada SMK Negeri 2 Tuban dengan metode ceramah	Persamaannya terletak pada fokus, jenis penelitian dan manfaat PBL.	Perbedaannya ada pada pendekatan penelitian, lokasi, dan detail temuan yang diangkat.(Hartatik, 2022)
----	-----------------------------------	--	--	---	---

			ternyata belum efektif.		
2.	Zulkarnaen, Junita Dwi Wardhani, Sri Katoningsih, Tri Asmawulan (2023). "Jurnal".	"Manfaat model Pembelajaran Project Based Learning untuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Implementasinya dalam Kurikulum Merdeka".	Diperoleh hasil bahwa PBL dapat meningkatkan kreativitas, pola hidup bersih dan sehat, kemampuan berpikir kritis dan kreatif,	Kedua sama-sama membahas penerapan PBL dan dampaknya terhadap hasil belajar, namun berbeda pada setting, mata pelajaran	Perbedaannya penelitian ini lebih kualitatif dan kontekstual pada Kurikulum Merdeka dan IPS, sedangkan jurnal lebih kuantitatif pada pelajaran kimia dengan

			kecerdasan visual spasial, dan keterampilan sosial siswa.	n, metode penelitian, dan fokus kurikulum.	pengukuran statistik. (Zulkarnain et al., 2023)
3.	Arifatul Hilmi Isfil Muna, Darsono. (2023). "Jurnal".	"Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Pada Pembelajaran Matematika Kelas X (Tantangan Dan	Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan mendapatkan hasil bahwa dalam proses penerapannya	Kedua yang membahas penerapan PBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa.	Penelitian ini fokus pada IPS di SMP dengan metode kualitatif dan Kurikulum Merdeka, jurnal fokus pada hasil belajar secara

		Harapan Pada Penerapan Kurikulum Merdeka)”	aktivitas guru dan siswa belum sesuai dengan langkah- langkah yang terdapat dalam model pembelajaran Problem Based Learning dan belum bisa dikatakan	kuantitatif tanpa spesifik mata pelajaran.. (Muna, 2023)
--	--	--	--	---

			optimal		
--	--	--	---------	--	--

C. Kerangka Berpikir

